



## VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL: TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN

### *VISUM ET REPERTUM AS A TOOL OF EVIDENCE IN PROOF OF SEXUAL VIOLENCE: A NORMATIVE JURIDICAL REVIEW OF THE LEGAL PROTECTION OF VICTIMS*

Chika<sup>1</sup>, Sabrina Widagdo<sup>2</sup>, Hudi Yusuf<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Indonesia

Email: [chiikaa191@gmail.com](mailto:chiikaa191@gmail.com)<sup>1</sup>, [sabrina.widagdo@gmail.com](mailto:sabrina.widagdo@gmail.com)<sup>2</sup>, [:hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)<sup>3</sup>

#### Article Info

##### Article history :

Received : 19-05-2024

Revised : 21-05-2024

Accepted : 23-05-2024

Published : 25-05-2024

#### Abstract

*The background to this research is based on the serious impact of sexual violence on victims, both physically, psychologically and socially, as well as the importance of an effective legal evidence process to ensure justice. Visum et Repertum, as a written report made by a medical expert after examining a victim of sexual violence, has a vital role in clarifying the incident of the crime and functions as written evidence that can confirm or deny the occurrence of the crime in the legal process. This research aims to analyze the evidence of criminal acts of sexual violence through the role of Visum et Repertum and identify the legal protection provided to victims of sexual violence. The method used is normative juridical, by collecting and analyzing legal materials such as books, articles, statutory regulations and related media. The importance of Visum et Repertum in the process of proving criminal cases, especially those relating to the human body, cannot be ignored. This evidence is included in the category of documentary evidence and expert testimony that has a strategic position. The research results show that Visum et Repertum can reveal medical facts regarding the victim's condition, thereby facilitating a fair and accurate law enforcement process. Considering the high rate of sexual violence and its detrimental impact on victims, eradicating and strictly enforcing the law against perpetrators is very important*

**Keywords :** *Visum et Repertum, Sexual Violence, Legal Protection*

#### Abstrak

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada dampak serius kekerasan seksual terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta pentingnya proses pembuktian hukum yang efektif untuk menjamin keadilan. Visum et Repertum, sebagai laporan tertulis yang dibuat oleh ahli medis setelah pemeriksaan korban kekerasan seksual, memiliki peranan vital dalam mengklarifikasi kejadian tindak pidana tersebut dan berfungsi sebagai bukti tertulis yang dapat memperkuat atau menyangkal terjadinya tindak pidana dalam proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian tindak pidana kekerasan seksual melalui peran Visum et Repertum dan mengidentifikasi perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti buku, artikel, peraturan perundang-undangan, dan media terkait. Pentingnya Visum et Repertum dalam proses pembuktian perkara pidana, terutama yang berkaitan dengan



tubuh manusia, tidak dapat diabaikan. Bukti ini termasuk dalam kategori bukti surat dan keterangan ahli yang memiliki kedudukan strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum et Repertum dapat mengungkap fakta-fakta medis mengenai kondisi korban, sehingga memudahkan proses penegakan hukum yang adil dan akurat. Mengingat tingginya angka kekerasan seksual dan dampaknya yang merugikan korban, pemberantasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku sangat penting.

**Kata Kunci : Visum et Repertum, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum**

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang berdampak sangat serius terhadap korban, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan trauma mendalam bagi korban, tetapi juga memerlukan perhatian khusus dalam proses pembuktian hukum untuk memastikan keadilan bagi korban dan sanksi yang tepat bagi pelaku. Visum et Repertum, yaitu alat bukti yang digunakan supaya menjelaskan terjadinya sikap melawan hukum, sangat penting dalam konteks pembuktian kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual. Setelah memeriksa korban kekerasan seksual, seorang ahli biasanya seorang dokter menulis laporan yang dikenal dengan nama Visum et Repertum. Laporan ini menjadi bukti tertulis di pengadilan yang dapat mendukung atau membantah adanya tindak pidana kekerasan seksual.

Selain itu, data ahli dalam Visum et Repertum juga membantu untuk menjelaskan kejadian pidana yang berlangsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bukti-bukti kejahatan kekerasan seksual dengan mengkaji fungsi Visum et Repertum dan menentukan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Penelitian ini mempergunakan teknik yuridis normatif, yakni menghimpun dan mengkaji sumber-sumber hukum, antara lain buku, artikel, peraturan perundang-undangan, dan media terkait. Pentingnya peran Visum et Repertum pada lingkungan hukum tak dapat disepelekan. Alat bukti surat dan keterangan ahli yang mempunyai peranan penting dalam proses penetapan perkara pidana khususnya yang berkaitan tubuh manusia termasuk dalam materi ini (Edison, 2015).

Melalui Visum et Repertum, berbagai fakta medis mengenai kondisi korbannya dapat diungkapkan, sehingga memudahkan proses penegakan hukum yang adil dan akurat. Mengingat tingginya angka kekerasan seksual dan dampaknya yang merugikan korban, maka pemberantasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku menjadikan amat krusial. Selain itu, perlindungannya hukum yang memadai bagi korban juga mesti menjadi prioritas utama (Aflanie, 2019). Hal ini mencakup upaya untuk melindungi hak-hak korban, memberikan dukungan psikologis, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Penelitian tersebut diinginkan bisa memberi partisipasi atas mengerti lebih dalam peran mengenai peran Visum et Repertum atas pembuktian aksi criminal kekerasan seksual dan bagaimana penjagaan hukum atas korban dapat dioptimalkan. Dengan demikian, upaya untuk mencapai keadilan bagi korban dan memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku kekerasan seksual dapat diwujudkan secara lebih efektif dan efisien.



---

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan Penelitian Penelitian ini mengkaji peran Visum et Repertum untuk menetapkan tindak pidana kekerasan seksual dan mendefinisikan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dengan menggunakan prosedur yuridis normatif. Untuk memahami dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, metode yuridis normatif disebut juga penelitian hukum normatif berfokus pada pemeriksaan dokumen hukum dan literatur terkait. Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan undang-undang dan konseptual sebagai metodologi penelitiannya. Dengan menggunakan metode legislasi, beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada masalah penelitian dikaji, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, peraturan khusus terkait kekerasan seksual, dan Visum et Repertum. Konsepsi hukum mengenai kekerasan seksual, pembuktian hukum, dan perlindungan korban semuanya dipahami dalam kerangka konseptual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Visum et Repertum dalam Pembuktian Kekerasan Seksual**

Visum et Repertum ialah dokumen resmi yang disusun oleh ahli medis setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual. Dokumen ini memainkan peran penting dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual karena berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang dapat menguatkan atau menyangkal terjadinya tindak pidana. Visum et Repertum termasuknya pada kategori bukti surat dan penjelasan pakar yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia. Visum et Repertum memberikan informasi medis yang objektif tentang kondisi fisik korban, seperti adanya luka, memar, atau tanda-tanda kekerasan lainnya. Informasi ini sangat penting karena dapat mengungkapkan bukti fisik yang mendukung keterangan korban dan saksi lainnya. Selain itu, Visum et Repertum juga membantu pengadilan dalam memahami konteks medis dari cedera yang dialami korban, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan adil berdasarkan fakta yang ada.

Selain itu, Visum et Repertum juga membantu pengadilan dalam memahami konteks medis dari cedera yang dialami korban. Melalui penjelasan medis yang rinci mengenai jenis, lokasi, dan penyebab luka, dokumen tersebut memberi ilustrasi yang gamblang mengenai kekerasan yang dialami korban, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan adil berdasarkan fakta yang ada. Keterangan medis dalam Visum et Repertum tidak hanya mengidentifikasi cedera fisik secara spesifik, tetapi juga mencoba memahami mekanisme dan akibat dari kekerasan yang terjadi. Misalnya, jenis luka dan pola cedera dapat memberikan petunjuk penting tentang bagaimana kejadian tersebut mungkin terjadi, apakah itu sesuai dengan deskripsi korban atau memiliki kejanggalan yang perlu diselidiki lebih lanjut. Dengan demikian, Visum et Repertum tidak hanya memberikan gambaran kondisi fisik korban, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang konteks kekerasan yang dialami. Hal ini menjadi krusial dalam proses penegakan hukum karena memungkinkan hakim dan penegak



hukum untuk menilai konsistensi dan validitas klaim korban secara medis, sehingga dapat membantu dalam menentukan keputusan yang lebih tepat dan adil. Keterangan medis yang terdapat dalam Visum et Repertum pula bisa digunakan guna menegakan atau membantah argument yang diutarakan atas sisi-sisi yang ikutserta atas kasus tersebut. Misalnya, hasil pemeriksaan medis yang mencatat cedera yang sesuai dengan pola kekerasan seksual yang dilaporkan korban dapat menguatkan bukti-bukti lain yang telah diajukan di pengadilan. Di sisi lain, jika terdapat ketidaksesuaian antara laporan medis dan klaim korban, hal ini juga dapat mengarahkan pengadilan untuk melakukan investigasi lebih lanjut guna memastikan kebenaran dan keadilan dalam penanganan kasus tersebut. Dengan demikian, peran Visum et Repertum dalam memberikan keterangan medis yang rinci dan obyektif menjadi krusial dalam upaya mencapai keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Selain fungsi utamanya dalam pembuktian, Visum et Repertum juga berperan dalam memberikan rasa keadilan bagi korban. Dokumen ini memastikan bahwa bukti-bukti medis yang relevan dipertimbangkan dalam proses hukum, sehingga korban mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Dengan adanya Visum et Repertum, proses hukum menjadi lebih transparan dan obyektif, karena keputusan hakim didasarkan pada bukti yang kuat dan valid. Visum et Repertum menghadirkan informasi medis yang tak hanya berperan untuk alat pembuktian, namun juga untuk instrumen agar menghormati hak-hak korban dalam proses hukum. Dokumen ini menyediakan fakta-fakta medis yang penting untuk menegaskan atau membantah klaim korban, memberikan suara kepada mereka yang sering kali berada dalam posisi rentan dan terdiskriminasi. Oleh karena itu, Visum et Repertum tidak hanya berfungsi sebagai bukti fisik, tetapi juga sebagai alat bantu yang esensial dalam proses penegakan hukum, memastikan bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan dapat diandalkan. Dengan pendekatan yang obyektif dan ilmiah, penggunaan Visum et Repertum dalam persidangan memperkuat integritas bentuk peradilan pidana. Prosesnya hukum yang didasarkan pada bukti medis yang terdokumentasi dengan baik dapat memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak. Visum et Repertum juga memberikan panduan yang jelas bagi penegak hukum dan pengadilan untuk memahami secara holistik kondisi korban, sehingga memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan substansial dan penuh empati terhadap mereka yang telah mengalami trauma. Pada perihalnya, peran Visum et Repertum tak Cuma terbatas dalam validitas bukti, namun membawa unsur kemanusiaan yang krusial dalam proses penegakan hukum.

## **2. Prosedur Pembuatan Visum et Repertum**

Tata cara pembuatan Visum et Repertum dimulai dengan pemeriksaan medis yang dilaksanakan atas dokter yang berkuasa. Pemeriksaan ini mencakup pengamatan visual, palpasi, dan, jika diperlukan, pemeriksaan laboratorium atau radiologi. Dokter kemudian mendokumentasikan temuan-temuan medis tersebut dalam laporan tertulis yang disebut



Visum et Repertum. Laporan ini harus mencakup deskripsi lengkap tentang kondisi fisik korban, jenis dan lokasi luka, serta penjelasan medis mengenai bagaimana luka tersebut dapat terjadi. Dokumen Visum et Repertum harus dibuat dengan cermat dan akurat karena memiliki implikasi hukum yang signifikan. Ketelitian dalam pembuatan Visum et Repertum juga penting untuk memastikan bahwa bukti yang disajikan di pengadilan adalah valid dan dapat diandalkan. Selain itu, dokter yang membuat Visum et Repertum pula bisa dipanggil jadi saksi pakar di peradilan guna memberikan penjelasan lebih lanjut tentang temuan medis yang tercantum dalam laporan tersebut.

Ketelitian dalam pembuatan Visum et Repertum sangat penting untuk memastikan bahwa bukti yang disajikan di pengadilan adalah valid dan dapat diandalkan. Dokter harus menjaga agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dan memastikan bahwa semua informasi medis tercatat dengan akurat dalam laporan Visum et Repertum. Kualitas dokumentasi yang tepat akan memastikan bahwa informasi medis yang relevan disajikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh pihak pengadilan. Selain itu, dokter yang membuat Visum et Repertum pun bisa dipanggil jadi saksi pakar di pengadilan guna memberikan penjelasan lebih lanjut tentang temuan medis yang tercantum dalam laporan tersebut. Sebagai saksi ahli, dokter memberikan wawasan yang mendalam kepada pengadilan tentang konteks medis dari cedera yang dialami korban. Mereka menjelaskan secara rinci mengenai jenis luka, lokasi, dan penyebabnya, serta memberikan interpretasi medis yang komprehensif.

Penjelasan ini membantu hakim dan juri memahami implikasi klinis dari bukti medis yang disajikan, serta bagaimana hal tersebut berkaitan dengan klaim korban terkait kekerasan seksual. Saksi ahli dokter memberikan perspektif yang obyektif dan terperinci, memungkinkan pengadilan untuk membuat keputusan yang lebih informan dan tepat berdasarkan bukti yang ada. Dengan keterlibatan dokter sebagai saksi ahli, integritas Visum et Repertum sebagai bukti medis dalam proses hukum semakin diteguhkan. Keterampilan dan pengetahuan medis dokter menjadi kunci dalam memberikan penjelasan yang terperinci dan terpercaya di pengadilan, menjadikan Visum et Repertum jadi alat bukti yang kuat dan bisa diandalkan. Sebagai bagian penting dari proses peradilan, peran dokter sebagai saksi ahli juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara bidang medis dan hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan cara yang sensitif dan profesional.

Keterlibatan dokter sebagai saksi ahli memperkuat integritas Visum et Repertum merupakan bukti medis yang kuat pada pemrosesan hukum. Pada saat bersaksi, dokter memberikan klarifikasi yang komprehensif dan obyektif tentang laporan Visum et Repertum, membantu memastikan bahwa bukti medis dipahami dengan benar dan diberikan bobot yang sesuai dalam pengambilan keputusan. Dokter sebagai saksi ahli memberikan interpretasi yang tepat dan mendalam terkait temuan medis yang tercatat dalam Visum et Repertum, menjelaskan secara terperinci kondisi fisik korban dan implikasi medisnya terhadap klaim kekerasan seksual yang diajukan. Keterlibatan dokter sebagai saksi ahli juga penting untuk memastikan bahwa pengadilan memahami konteks medis dari cedera yang dialami korban



secara lengkap dan akurat. Dokter memberikan penjelasan yang ilmiah dan profesional, membantu hakim dan juri dalam menafsirkan bukti medis dengan tepat.

Melalui demikiannya, cara pengambilan keputusan di pengadilan menjadikan lebih terinformasi serta objektif, karena didukung oleh penjelasan yang kompeten dari seorang ahli medis yang terlibat langsung dalam pemeriksaan korban. Lebih dari sekadar langkah administratif, prosedur pembuatan Visum et Repertum dengan keterlibatan dokter sebagai saksi ahli merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang memastikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Kehadiran dokter sebagai saksi ahli memberikan legitimasi yang lebih besar terhadap bukti medis yang disajikan, memastikan bahwa informasi yang diajukan kepada pengadilan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini penting untuk menegakkan keadilan dan memberi perlindungan hukum yang pantas untuk korban kekerasan seksual, serta memastikannya maka cara hukum berlangsung selaras melalui prinsip-prinsip keadilan serta kebenaran. Dengan demikian, kolaborasi antara bidang medis dan hukum melalui Visum et Repertum menjadi esensial dalam memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat dalam sistem peradilan.

### **3. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual**

Perlindungan hukum atas korban kekerasan seksual adalah aspek penting dalam penegakan hukum yang adil dan efektif. Hukum pidana di Indonesia telah mengatur berbagai mekanisme untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual, baik selama proses penyidikan ataupun di pengadilan. Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan perawatan medis, dukungan psikologis, serta perlindungan terhadap ancaman atau intimidasi dari pelaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memberi perlindungan juga pada kekerasan seksual merupakan salah satu undang-undang terkait. Selain itu, anak korban pelecehan seksual diberikan perlindungan ekstra melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pada konteks perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan peraturan perundang-undangan yang sangat relevan. Undang-undang ini memberi landasan hukum yang kuat untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. PKDRT memberikan definisi kekerasan dalam rumah tangga secara luas termasuk kekerasan seksual serta menetapkan tanggung jawab pemerintah atas perlindungan korban, termasuk menawarkan perlindungan, pengobatan, dan program pencegahan. Selain PKDRT, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) menjadi landasan penting untuk memberikan perlindungan ekstra kepada anak di bawah umur yang mengalami pelecehan seksual. Undang-undang ini mengakui hak-hak anak atas perlindungan penuh, perhatian medis, dukungan psikiatris, dan layanan lain yang diperlukan untuk membantu mereka pulih dari dampak psikologis, emosional, dan fisik akibat pelecehan seksual.





UU PA menekankan pentingnya melindungi kepentingan terbaik anak dalam setiap tindakan yang melibatkan mereka, serta memberikan jaminan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak-anak yang sebagai korbannya dari kekerasan seksual. Kedua undang-undang tersebut menegaskan tanggung jawab negara dan masyarakat dalam melindungi korban kekerasan seksual, terutama yang rentan seperti anak-anak dan korban dalam lingkup rumah tangga. Mereka juga mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memenuhi standar internasional terkait hak asasi manusia, perlindungan anak, dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan. Namun, implementasi yang efektif dari kedua undang-undang ini tetap menjadi tantangan, memerlukan koordinasi lintas sektoral, sumber daya yang memadai, dan kesadaran yang lebih luas dalam masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban kekerasan seksual. Dengan demikian, upaya terus dilakukan untuk memperkuat implementasi undang-undang dan memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dan dukungan yang layak sesuai dengan hak-hak mereka dalam hukum dan norma yang berlaku.

#### **4. Tantangan dalam Penerapan Visum et Repertum dan Perlindungan Hukum**

Meskipun Visum et Repertum merupakan alat bukti yang penting, terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya dokter yang terlatih dalam membuat Visum et Repertum, terutama di daerah-daerah terpencil (Ranoemihardja, 1991). Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pembuatan laporan atau kurangnya kualitas laporan yang dihasilkan. Selain itu, korban kekerasan seksual sering kali menghadapi hambatan psikologis dan sosial dalam melaporkan tindak pidana yang mereka alami. Stigma sosial, rasa malu, dan ketakutan akan balas dendam dari pelaku sering kali membuat korban enggan melapor ke pihak berwenang. Oleh karena itu, penting guna menumbuhkan keasarian social mengenai pentingnya pelaporan kekerasan seksual serta memberi dukungan yang memadai ke korban.

#### **5. Upaya Peningkatan Efektivitas Pembuktian dan Perlindungan Korban**

Untuk meningkatkan efektivitas pembuktian kekerasan seksual dan perlindungan hukum bagi korban, diperlukan beberapa upaya: Pelatihan bagi Tenaga Medis: Meningkatkan kompetensi dokter dan tenaga medis dalam melaksanakan pengecekan serta pembikinan Visum et Repertum melalui pelatihan dan sosialisasi reguler. Perbaikan Regulasi: Meninjau dan memperbaiki aturan UU yang terpaut melalui kekerasan seksual guna memastikan bahwa hukum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban dan sanksi yang tepat bagi pelaku. Dukungan Psikologis dan Sosial: Menyediakan layanan dukungan psikologis dan sosial yang mudah diakses oleh korban kekerasan seksual untuk membantu mereka dalam proses penyembuhan dan pelaporan.

Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat: Meningkatkan kesadaran penduduk mengenai krusialnya pelaporan seksual serta masyarakat mengenai perlunya pelaporan kekerasan seksual serta perlindungan hukum bagi korban melalui kampanye publik, pendidikan, dan sosialisasi. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan proses pembuktian tindak pidana kekerasan



---

seksual dapat menjadi lebih efektif dan perlindungan hukum bagi korban dapat dioptimalkan, sehingga keadilan bagi korban dapat diwujudkan

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti peran penting Visum et Repertum atas pembuktian aksi criminal kekerasan seksual serta mengidentifikasi penjagaan hukum bagi korban. Visum et Repertum, jadi bukti tertulis yang dihasilkan atas pakar medis, memberikan informasi objektif yang krusial untuk memperkuat atau menyangkal terjadinya kekerasan seksual. Prosedur pembuatan yang akurat sangat penting untuk validitas bukti di pengadilan. Meskipun hukum Indonesia telah mengatur mekanisme perlindungan bagi korban melalui berbagai undang-undang, tantangan seperti kurangnya tenaga medis terlatih dan hambatan psikologis serta sosial dalam pelaporan masih ada. Untuk mengatasi ini, diperlukan pelatihan medis, perbaikan regulasi, dukungan psikologis yang memadai, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, proses hukum yang adil dan perlindungan optimal bagi korban kekerasan seksual bisa diwujudkan berlebih baik serta tepat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Edison Perangin-Angin, Diktat Kuliah Hukum Kedokteran Kehakiman, (Diktat Kuliah UHN, Medan, 2014-2015), Hlm. 25.
- Iwan Aflanie, Ilmu kedokteran Forensik & Medikolegal, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), Hlm. 46.
- R. Atang Ranoemihardja, 1991, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Tarsito, Bandung, hal. 25.
- R. Soeparmono, 2002, Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung, hal. 2.